

KONTRIBUSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH(UMKM) DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI DEPOK

Sudarno

Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta Kampus UI Depok 16425

Email : sudarno_pnj@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mencoba mengetahui sampai seberapa besar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) di Depok dapat menyerap tenaga kerja dan Kebijakan-kebijakan apa yang dapat diambil dalam rangka pemberdayaan UMKM agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Penduduk Depok pada tahun 2011 mencapai 1.756.565 orang ,terdiri dari 879.325 orang laki-laki dan 857.240 orang perempuan. Dari jumlah tersebut di atas yang masuk angkatan kerja mencapai 730.924 orang atau hanya 41%, itu berarti sekitar 59 persen terdiri anak-anak, remaja dan orang lanjut usia. Dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 730.924 orang, yang dapat diserap oleh pasar tenaga kerja hanya sebesar 657.050, itu berarti terdapat pengangguran sebesar 73.874 orang atau mencapai 10%, Kemampuan UMKM di Depok Menyerap keseluruhan angkatan kerja sebesar 534.500 orang atau sekitar 73 %. Permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh pengusaha UKM adalah masalah kurangnya modal, yakni sebesar 45%, disusul kemudian masalah kurang terampilnya sumber daya manusia, masalah bahan baku juga termasuk permasalahan serius, ini menempati tingkat permasalahan rangking tiga, yakni sebesar 4%. Masalah lainnya seperti persaingan, lokasi, perijinan, pemasaran dan lain-lain merupakan permasalahan berikutnya yang sering dihadapi oleh pengusaha UKM.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dalam menggerakkan potensi ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan pendapatan sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Upaya pemberdayaan UMKM dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya baik dalam hal kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan investasi, penerimaan devisa melalui ekspor komoditi dan atau jasa.

UMKM diharapkan dapat membantu penyerapan tenaga kerja, mengingat sebagian besar UMKM sifatnya padat karya, sehingga pertumbuhan UMKM mempunyai dampak yang

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama didaerah padat penduduk seperti Jawa Barat yang merupakan propinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Umumnya tenaga kerja yang diserap oleh UMKM adalah tenaga kerja yang berpendidikan setingkat SLTA dan tingkat pendidikan dibawahnya. Hanya saja mungkin kondisi usaha yang ditangani oleh UMKM ini belum begitu menggemblirakan karena pengucuran kredit yang masih berkesan ekstra hati-hati dari pihak perbankan setempat.

Perhatian untuk menumbuh kembangkan usaha Mikro,kecil dan menengah (UMKM) setidaknya dilandasi oleh tiga alasan. *Pertama*, UMKM sebagai strategi mempertahankan hidup (*survival strategy*) di tengah krismon.

Kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak UMKM juga intensif dalam menggunakan sumberdaya alam

lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di pedesaan, pertumbuhan identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 1999:250).

UMKM akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi di pedesaan. Dari sisi kebijakan, UMKM jelas perlu mendapat perhatian karena tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja Indonesia, namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Di pedesaan, peran penting UMKM memberikan tambahan pendapatan, sebagai pengembangan industri dan sebagai pelengkap produksi pertanian bagi penduduk miskin. Boleh dikata, ia juga berfungsi.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas maka peneliti merumuskan masalah pada hal-hal sebagai berikut:

1. Seberapa besar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) di Depok dapat menyerap tenaga kerja?
2. Kebijakan-kebijakan apa yang dapat diambil dalam rangka pemberdayaan UMKM agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

TINJAUAN PUSTAKA

Ada dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi usaha kecil menurut *Undang-Undang No. 20 tahun 2008* tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no 20 Tahun 2008. Kriteria tersebut antara lain memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kedua, menurut kategori *Badan Pusat Statistik (BPS)*, usaha kecil

pedesaan, pertumbuhan identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 1999:250).

Kendati ada beberapa definisi mengenai usaha kecil namun agaknya usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam. **Pertama**, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Data BPS (1994) menunjukkan hingga saat ini jumlah pengusaha kecil telah mencapai 34,316 juta orang yang meliputi 15, 635 juta pengusaha kecil mandiri (tanpa menggunakan tenaga kerja lain), 18,227 juta orang pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri serta 54 ribu orang pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap. **Kedua**, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. **Ketiga**, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum Menurut catatan BPS(1994), dari jumlah perusahaan kecil sebanyak sebanyak 124.990, ternyata 90,6 persen merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris; 4,7 persen tergolong perusahaan perorangan berakta notaris; dan hanya 1,7 persen yang sudah mempunyai badan hukum (PT/NV, CV, Firma, atau Koperasi). **Keempat**, dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC31), diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam (ISIC36), industri tekstil (ISIC32), dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga (ISIC33) masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada.

Sedangkan yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas (34) dan kimia (35) relatif masih sangat sedikit sekali yaitu kurang dari 1%.

Padahal, UMKM memiliki peranan yang cukup besar dalam industri manufaktur dilihat dari sisi jumlah unit usaha dan daya serap tenaga kerja, namun lemah dalam menyumbang nilai output. Pada tahun 2002, dari total unit usaha manufaktur di Indonesia sebanyak 2,732 juta, ternyata 99,2 % merupakan unit usaha UMKM. UMKM, dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, mampu menyediakan kesempatan kerja sebesar 59,3 % dari total kesempatan kerja. Kendati demikian, sumbangan nilai output UMKM terhadap industri manufaktur hanya sebesar 17,8 %. Pola ini cenderung sama dari tahun ke tahunnya (1997-2002). Banyaknya jumlah orang yang bekerja pada UKM memperlihatkan betapa pentingnya peranan UMKM dalam membantu memecahkan masalah pengangguran dan pemerataan distribusi pendapatan

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Seberapa besar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Depok dapat menyerap tenaga kerja?
2. Untuk Mengetahui Kebijakan-kebijakan apa yang dapat diambil dalam rangka pemberdayaan UMKM agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak?

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dalam pengembangan dan pembinaan UMKM di Depok, sekaligus upaya untuk menanggulangi pengangguran yang semakin hari semakin meningkat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam tahap-tahap, yaitu:

1. Metode Pengumpulan Data
Data diambil melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden, yang merupakan sampel dari pengusaha UMKM di Depok
2. Tahap Pra Lapangan:

Menyusun instrument penelitian berupa pedoman wawancara untuk para tenaga lapangan.

3. Teknik Analisa Data menggunakan analisa tabulasi dengan membandingkan data antar periode.
4. Cara Penafsiran dan Penyimpulan

HASIL PENELITIAN

Dengan menggunakan teknik analisa data tersebut diatas maka dapat menyimpulkan seberapa besar pengaruh UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja

Profil Wilayah

Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan Jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang peresmiannya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri dalam Negeri (H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Desa, yaitu :

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoram Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan Jaya, Desa Rangkapan Jaya Baru.
2. Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu : Desa Beji, Desa Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Mekarjaya, Desa Sukma Jaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, Desa Kalimulya.

Selama kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang pesat baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan. Khususnya bidang Pemerintahan semua Desa berganti menjadi kelurahan dan adanya pemekaran Kelurahan, sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (Kecamatan) dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.
2. Kecamatan Beji terdiri dari (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru.
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Suka Maju, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Kali Jaya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jati Mulya, Kelurahan Tirta Jaya.

Terbentuknya Kota Depok dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok diangkat menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama -

- sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut, dan
2. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu : Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan Desa Bedahan, Desa Pasir Putih.
 3. Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.
 4. Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu : Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.

mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Undang – undang No. 15 tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999 berbarengan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok.

Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tk. II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok dapat dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.

Berdasarkan Undang – undang nomor 15 tahun 1999 Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana tersebut diatas ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yaitu :

1. Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa , yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman , Kota Pendidikan, Pusat pelayanan perdagangan dan jasa, Kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.

4.2. Data Ketenagakerjaan di Depok

Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik Kota Depok, total penduduk Kota Depok Tahun 2010 mencapai 1.736.565 jiwa. Dari jumlah tersebut, 879.325 orang adalah laki-laki dan 857.240 perempuan

Tabel 1:
Data Angkatan Kerja di Depok

	Jumlah Penduduk	Angkatan Kerja	Jumlah orang Berkerja	Pengangguran
Laki-Laki	879.325	449.564	413.935	35.629
Perempuan	857.240	281.360	243.115	38.425
Jumlah	1.736.565	730.924	657.050	73.874

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Depok, 2011

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Depok 2010, peta ketenagakerjaan di Kota Depok, Jumlah angkatan kerja sebanyak 730.924 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 449.564 laki-laki dan 281.360 perempuan. Sedangkan jumlah orang yang bekerja sesuai dengan data Disnakersos adalah sejumlah 657.050 orang. Yang terdiri dari 413.935 laki-laki dan 243.115 perempuan. Jadi jumlah pengangguran di Kota Depok sebanyak 73.874 orang, terdiri dari 35.629 laki-laki dan 38.425 perempuan. Penyebab pengangguran dipengaruhi beberapa faktor, antara lain, **pertama**, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. **Kedua**, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. **Ketiga**, kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. **Keempat**, perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor. Setiap tahun angka pengangguran di Kota Depok terus merambat naik yang didominasi oleh penganggur usia muda, berpendidikan rendah, penganggur wanita dan sebagian penganggur terdidik. Namun pihak Dinas tenaga kerja mengakui belum mempunyai data yang lengkap. Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi, menyebabkan, pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Masalah pengangguran dan setengah pengangguran merupakan permasalahan di muara yang tidak bisa diselesaikan pada titik itu saja, tapi juga harus ditangani dari hulu sampai ke hilir.

Sektor di hulu yang banyak berdampak pada pengangguran dan setengah pengangguran adalah sektor kependudukan, pendidikan dan ekonomi. Untuk itu, diperlukan penanganan khusus secara terpadu program aksi penciptaan dan perluasan kesempatan kerja oleh semua pihak serta dituntut pula sebuah kesadaran yang tinggi bagi masyarakatnya.

4.3. Populasi dan Sample

Untuk penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan pengolahan (manufaktur) yang berskala kecil dan menengah (UKM) yang berada di enam kecamatan di kota Depok. Keenam kecamatan tersebut, yaitu: Sawangan, Beji, Cimanggis, Pancoran Mas dan Sukmajaya.

Berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri pengolahan digolongkan menjadi industri besar, sedang dan kecil. Jika suatu perusahaan industri mempunyai tenaga kerja diatas 99 orang maka perusahaan tersebut diklasifikasikan menjadi industri besar, jika tenaga kerja antara 20 – 99 orang masuk industri sedang, sedangkan industri kecil mempunyai tenaga kerja 5-19 orang.

Jumlah industri Kecil dan Menengah di Kota Depok hasil pendaftaran usaha/perusahaan menurut Kadin Kota Depok adalah 126 perusahaan. Industri yang paling banyak di kota Depok adalah industri makanan dan minuman ada 26 perusahaan, kemudian industri pakaian jadi ada 26 perusahaan. Pada Penelitian ini sample di ambil 30% dari populasi. Di bawah ini adalah daftar sample dan populasi (tabel 3)

Tabel 2:
Industri Pengolahan Berskala Kecil dan Menengah di Depok

No	Jenis Industri	Populasi	Tenaga Kerja
1	Industri Alat Rumah Tangga	8	434
2	Industri Obat	4	227
3	Industri Kerajinan	18	956
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	25	1.030
5	Percetakan	10	210
6	Industri Logam dan	10	220

7	Elektronik		
8	Industri Suku Cadang	4	190
8	Industri Mesin Perkakas	5	322
9	Industri Kimia dan Kertas	10	170
10	Makanan dan Minuman	26	1.190
	Tatal	126	534.500

Sumber : Data Primer diolah, 2011

Sedangkan mengenai data responden baik dilihat dari umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status menikah, jenis pekerjaan dan modal usaha yang dimiliki pada saat awal memulai usaha dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 3:
Industri Pengolahan
Berskala Kecil dan Menengah di Depok

No	Jenis Industri	Populasi	Sample
1	Industri Alat Rumah Tangga	5	2
2	Industri Obat	4	2
3	Industri Kerajinan (handicraf)	18	5
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	29	8
5	Percetakan	10	3
6	Industri Logam dan Elektronik	10	3
7	Industri Suku Cadang	4	2
8	Industri Mesin Perkakas	5	2
9	Industri Kimia dan Kertas	10	3
10	Makanan dan Minuman	28	8
	Tatal	126	38

Sumber : Data Primer diolah, 2011

Tabel 4:
Jumlah responden
berdasarkan Umur dan Jenis kelamin

No	Jenis	Jumlah	Prosentase
1	Umur/Tahun:		
	a. 20 – 30	3	7,89%
	b. 31 – 40	15	39,47%
	c. 41 – 50	14	36,84%
	d. 51 – 60	4	10,52%
	e. > 61	2	5,26%
2	Kelamin		
	a. laki-laki	26	68,42%
	b. Perempuan	12	31,57%

Sumber: Data primer diolah, 2011

Dari data di atas jelas bahwa responden terbanyak berusia pada umur 31 sampai 40

tahun, ini menunjukkan bahwa dikalangan usia muda sudah tergerak untuk melakukan usaha yang sangat beragam.

Sedangkan usia 41 sampai dengan 50 tahun juga menunjukkan jumlah yang cukup banyak ini berarti bahwa kegiatan usaha masih produktif dilakukan oleh responden yang berusia di atas 40 tahun.

Berikut tabel 5 yang menjelaskan mengenai tingkat pendidikan, status marital, jumlah anak dan pekerjaan

Tabel 5:
Tingkat Pendidikan, status marital, jumlah anak

No	Jenis	Jumlah	Prosentase
1	Pendidikan		
	a. SD	3	7%
	b. SMP	7	18%
	c. SMU	22	57%
	d. Diploma/Sarjana	6	15%
2	Status Marital		
	a. Menikah	25	65%
	b. Belum menikah	13	35%
3	Jumlah anak yang ditanggung		
	a. 1 – 2 anak	17	44%
	b. 3 – 4 anak	5	13%
	c. > 4 anak	3	7%
	d. Belum/Tidak memiliki anak	8	21%

Sumber: Data primer diolah, 2011

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa angka terbesar responden untuk tingkat pendidikan yang terbanyak adalah tingkat SMU sebesar 22% ini menunjukkan bahwa saat ini yang tergerak untuk mengembangkan usaha sendiri adalah berpendidikan menengah. Sedangkan untuk status marital yang terbanyak sudah menikah 25 % dengan jumlah keluarga/anak yang menjadi tanggungan berkisar tidak lebih dari dua anak yaitu sebesar 44%. Angka ini berarti bahwa dalam situasi ekonomi saat ini menjadi pilihan yang tepat untuk tidak memiliki jumlah tanggungan yang banyak melebihi tingkat pendapatan yang diperoleh sebagai bagian dari mata pencaharian.

Adapun untuk modal usaha yang dimiliki oleh responden dapat dilihat dari tabel 6 berikut.

Tabel 6

Modal awal usaha dan Jenis usaha

No	Jenis	Jumlah	Prosentase
1	Modal awal usaha:		
	a. 1.000.000 – 10.000.000	5	13%
	b. 11.000.000 – 20.000.000	7	18%
	c. 21.000.000 - 30.000.000	6	14%
	d. 31.000.000 - 40.000.000	10	26%
	e. 41.000.000 – 50.000.000	5	13%
	f. > 50.000.000	5	13%
2	Jenis Usaha:		
	• Industri Alat Rumah Tangga	2	5%
	• Industri Obat	2	5%
	• Industri Kerajinan (handicraf)	5	13%
	• Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	8	21%
	• Percetakan	3	7%
	• Industri Logam dan Elektronik	3	7%
	• Industri Suku Cadang	2	5%
	• Industri Mesin Perkakas	2	5%
	• Industri Kimia dan Kertas	3	7%
	• Makanan dan Minuman	8	21%

Sumber: Data primer diolah, 2011

Dari tabel 4 di atas industri yang paling banyak adalah industri makanan dan minuman, yakni sebesar 21%, disusul kemudian industri tekstil dan pakaian jadi.

**Tabel 7:
Hambatan Dalam Menjalankan Usaha**

No	Jenis hambatan	Jumlah	Prosentase
1	Kurangnya modal	17	45%
2	Sulit untuk mencari bahan baku	4	9%
3	Staf /pegawai kurang terampil	6	14%
4	Banyak usaha yang sejenis	3	8%
5	Tempat tidak strategis	2	5%
6	Ijin usaha yang agak sulit	2	5%
7	Promosi produk kurang	2	5%
8	Harga jual produk mahal sehingga sulit untuk bersaing	2	5%

Sumber : Data primer diolah, 2011

Permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh pengusaha UKM adalah masalah kurangnya modal, yakni sebesar 45%, disusul kemudian masalah kurang terampilnya sumber daya manusia, masalah bahan baku juga termasuk permasalahan serius, ini menempati tingkat permasalahan rangking tiga, yakni sebesar 4%. Masalah lainya seperti persaingan, lokasi, perijinan, pemasaran dan lain-lain merupakan permasalahan berikutnya yang sering dihadapi oleh pengusaha UKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penduduk Depok pada tahun 2011 mencapai 1.756.565 orang ,terdiri dari 879.325 orang laki-laki dan 857.240 orang perempuan. Dari jumlah tersebut di atas yang masuk angkatan kerja mencapai 730.924 orang atau hanya 41%, itu berarti sekitar 59 persen terdiri anak-anak, remaja dan orang lanjut usia

Dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 730.924 orang, yang dapat diserap oleh pasar tenaga kerja hanya sebesar 657.050, itu berarti terdapat pengangguran sebesar 73.874 orang atau mencapai 10%,

Kemampuan UMKM di Depok Menyerap keseluruhan angkatan kerja sebesar 534.500 orang atau sekitar 73 %

Permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh pengusaha UKM adalah masalah kurangnya modal, yakni sebesar 45%, disusul kemudian masalah kurang terampilnya sumber daya manusia, masalah bahan baku juga termasuk permasalahan serius, ini menempati tingkat permasalahan rangking tiga, yakni sebesar 4%. Masalah lainya seperti persaingan, lokasi, perijinan, pemasaran dan lain-lain merupakan permasalahan berikutnya yang sering dihadapi oleh pengusaha UKM.

Saran

Agar daya serap UMKM di Depok dapat ditingkatkan maka kami memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Depok melalui dinas yang terkait sebaiknya mencari jalan keluar terhadap

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha, termasuk permodalan, bahan baku, persaingan usaha, perijinan dan penggunaan teknologi informasi yang sesuai.

- b. Pemerintah Daerah Depok melalui dinas yang terkait harus lebih proaktif dalam meeningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan. Dengan cara membangun sistem peningkatan kualitas tenaga kerja, meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pelatihan, produktivitas dan penempatan tenaga kerja. meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan kerja swasta, perguruan tinggi. serta mendorong peranan masyarakat luas di bidang Ketenagakerjaan meliputi pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kuncoro, Mudrajad. 1997. Pengembangan Pola Pembinaan Usaha Kecil dan Masyarakat di Sekitar Obyek dan Kawasan Pariwisata, PT Asana Wirasta Setia dan Deparpostel, Yogyakarta.
- [2] Kustituantio, Bambang, dkk. 1995. *Laporan Akhir Pengembangan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, kerjasama Depkop & PPK dengan PPE-FE-UGM, Yogyakarta.